

# PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALEMBANG

MUHAMMAD RAIHAN  
NPP. 31.0235

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas*  
email : muhraihan796@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Ika Sartika, MT.

## ABSTRACT

**Background (GAP):** This thesis investigates the role of the Environmental and Sanitation Agency in managing waste in Palembang City. The background of the study highlights the critical function of the agency in addressing the city's waste management issues. **Objective:** This study aims to identify the factors inhibiting the formation of BUMKam, analyze the efforts that have been made, and explore the prospects of the local government in the formation of BUMKam. **Objective:** The research aims to understand and analyze the role of the Environmental and Sanitation Agency in Palembang, describe the challenges faced by the agency in waste management, and identify the efforts made to mitigate these challenges. **Method:** Considering the issues at hand and the nature of this research, a descriptive research approach was employed. This approach involves qualitative data collection methods which are then described comprehensively. Descriptive research is often used to analyze phenomena, events, or social conditions, as noted by Sayidah (2018). Data collection techniques for this study were based on Sugiyono (2012), including observation, interviews, and documentation. **Results/Findings:** Using role theory by Arimbi & Santosa (2003), which considers roles as policies, strategies, communication tools, and dispute resolution mechanisms, the analysis concludes that the waste management efforts by the Environmental and Sanitation Agency are fairly effective. **Conclusion:** However, some dimensions of implementation require further optimization to fully address the waste management problems in Palembang City, South Sumatra Province.

**Keywords:** Role, Environmental and Sanitation Agency, Waste Management, Palembang City, South Sumatra Province

## ABSTRAK

**Latar Belakang (GAP):** Latar belakang permasalahan yaitu peran dinas dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Palembang. **Tujuan:** Adapun skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, untuk mendeskripsikan faktor hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, serta untuk mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Palembang dalam menanggulangi pengelolaan sampah. **Metode:** Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada dan jenis penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan metode penelitian yang mengumpulkan data secara kualitatif dan kemudian dijelaskan secara deskriptif. Penelitian deskriptif sering digunakan untuk

menganalisis fenomena, kejadian, atau kondisi sosial, seperti yang diungkapkan oleh Sayidah (2018). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2012) yang terbagi atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori peran oleh Arimbi & Santosa (2003), yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini sudah cukup efektif. **Kesimpulan:** Dikarenakan ada beberapa dimensi yang implementasinya masih kurang maksimal dalam mencapai tujuan akhir, yaitu mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

**Kata Kunci:** Peran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pengelolaan Sampah, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari provinsi-provinsi yang dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang luas, kecuali untuk urusan pemerintahan yang secara khusus ditetapkan oleh undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah memiliki hak untuk merumuskan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta bantuan lainnya di wilayah mereka sendiri. Tata cara dan prosedur pelaksanaan pemerintahan daerah diatur dalam peraturan undang-undang. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dan kota, diatur melalui undang-undang dengan memperhatikan karakteristik dan keragaman masing-masing daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pelayanan publik, serta penggunaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur dan dilaksanakan secara adil dan seimbang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Satuan pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus atau istimewa diakui dan diberikan penghormatan oleh negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintah mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat adat selama tetap konsisten dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah. "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan" dengan prinsip pemberian otonomi yang maksimal dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Kansil (2013: 189) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas



pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan panduan pengaturan, yaitu didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku, kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat, prinsip koordinasi, tertulis, dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan, serta kesederhanaan atau tidak berbelit-belit.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan karakteristik khusus suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merujuk pada hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk secara mandiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat (1) “bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang diserahkan kepada daerah sebagai landasan pelaksanaan otonomi daerah. Di sisi lain, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala negara. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi tanggung jawab daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib mencakup urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mencakup tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) poin (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu urusan yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat adalah pengelolaan lingkungan hidup, yang termasuk dalam kategori urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Daerah diwajibkan untuk

mengikuti peraturan, ketentuan, prosedur, dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam menentukan kebijakannya. Pejabat pemerintah daerah memiliki prioritas dalam melaksanakan kebijakan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar dalam kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelayanan dasar diatur oleh standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dijalankan melalui: (a) sendiri oleh pemerintah pusat, (b) melalui pengalihan kewenangan kepada Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat (GWPP) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, atau melalui penugasan kepada instansi vertikal yang beroperasi di daerah berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tingkat kepadatan yang tinggi. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa populasi penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada bulan Juni 2022. Jumlah ini meningkat sebesar 1,48 juta jiwa (0,54%) dibandingkan dengan posisi pada bulan Desember 2021. Selain itu, jumlah ini juga meningkat sebesar 3,13 juta jiwa (1,15%). Di Kota Palembang, penduduknya mencapai 1.686.073 jiwa (BPS, 2023). Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di kota tersebut. Dalam pengolahan sampah Kota Palembang menghasilkan 426.390,66 ton sampah pada tahun 2020, dengan 19,79 persen pengurangan sampah dan 76,69 persen penanganan sampah. Dari jumlah sampah tersebut, 96,49 persen dikelola dan 3,51 persen tidak dikelola. Pengelolaan sampah menghadapi beberapa tantangan, seperti Bank Sampah dan TPS 3R yang tidak berfungsi karena pembatasan kerumunan dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah. Selain itu, DLHK bertanggung jawab untuk merencanakan perluasan tempat pemrosesan akhir sampah dan mempersiapkan TPA Karya Jaya di Kecamatan Kertapati, yang memiliki luas 45 hektar, sebagai tempat cadangan untuk pergantian lokasi baru. Selain itu, mereka terlibat dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dan pengembangan teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizer untuk bahan baku Pabrik Semen Baturaja.

Secara keseluruhan, DLHK Kota Palembang berusaha menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang efisien serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Jumlah penduduk yang tinggi di kota tersebut berdampak pada peningkatan volume sampah yang perlu dikelola dengan baik untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kota.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Kota Palembang menghadapi kesenjangan yang signifikan dalam pengelolaan sampah, terutama terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang terbatas. Meski kota ini menghasilkan sekitar 426.390,66 ton sampah pada tahun 2020, hanya 19,79 persen dari jumlah tersebut yang berhasil dikurangi dan 76,69 persen yang dikelola dengan baik. Kesenjangan ini diperburuk oleh Bank Sampah dan TPS 3R yang tidak berfungsi optimal karena pembatasan



kerumunan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik juga berkontribusi pada peningkatan volume sampah yang tidak tertangani dengan baik, yang mengakibatkan masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan yang serius.

Selain itu, kesenjangan dalam perencanaan dan implementasi teknologi pengolahan sampah juga menjadi masalah utama. DLHK Kota Palembang telah merencanakan perluasan tempat pemrosesan akhir sampah dan pengembangan teknologi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dan homogenizer untuk bahan baku Pabrik Semen Baturaja. Namun, realisasi dari rencana ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, dukungan kebijakan, dan kapasitas teknis. Sementara itu, populasi Kota Palembang yang terus bertambah, mencapai 1.686.073 jiwa pada tahun 2023, menambah tekanan pada sistem pengelolaan sampah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan ini, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah, serta dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

#### **1. Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

Penelitian ini, yang dilakukan oleh Rusadi dan S. Setiawan W. dan diterbitkan di Jurnal Kajian Pemerintah pada tahun 2022, bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Dalam penelitian ini, beberapa fenomena diidentifikasi, yaitu kurangnya pembatasan sampah oleh masyarakat, minimnya sosialisasi dari dinas terkait, dan tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pemilahan sampah. Penelitian ini menggunakan teori Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pengelolaan sampah belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dan masih kurang efektif dalam pelaksanaannya (Rusadi & Setiawan, 2022).

#### **2. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya**

Penelitian oleh Ninef R., Y. Harton S., dan A. Rochim A. I., yang dipublikasikan di Madika: Jurnal Politik dan Governance pada tahun 2023, mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah dan kebersihan. Berdasarkan teori peran dari Iyas Yusuf, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis penerapan standar pelayanan sesuai Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Surabaya telah dijalankan sesuai prosedur, dengan metode pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang efektif melalui sosialisasi dan kerja bakti (Ninef et al., 2023).

### **3. Evaluasi Kinerja Aplikasi SiDarling dalam Pengelolaan Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Provinsi Bali**

Penelitian oleh Sihombing J., Wirantari I. D. A. P., dan Supriliyani N. W., diterbitkan di *Ethics and Law Journal* pada tahun 2023, mengevaluasi kinerja aplikasi SiDarling di Kota Denpasar. Menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Pemerintah menurut Willian N. Dunn dengan enam indikator, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi berjalan cukup baik, namun belum optimal dan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut (Sihombing et al., 2023).

### **4. Pelaksanaan Pengolahan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang**

Penelitian oleh Sutinah Andaryani, Dwikurniawati I. U., dan Rusdi R., yang diterbitkan di *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* pada tahun 2023, menganalisis pengelolaan sampah di Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai upaya pengurangan sampah seperti pembentukan Bank Sampah dan TPS 3R, sosialisasi, serta pembatasan penggunaan plastik. Namun, terdapat kendala seperti operasi terbatas Bank Sampah dan TPS 3R serta rendahnya kesadaran masyarakat (Sutinah Andaryani et al., 2023).

### **5. Efektivitas Media Sosial Instagram sebagai Sarana Komunikasi Publik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Penelitian oleh Susi Artuti, Erda Dewi, Rosmala, dan Debby Kurniadi, diterbitkan di *JURNAL SOSIO-KOMUNIKA* pada tahun 2023, fokus pada penggunaan Instagram sebagai sarana komunikasi publik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan teori Shimp, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan Instagram efektif dalam menangani keluhan masyarakat terkait sampah dan berhasil dalam memberikan informasi yang positif serta edukatif, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam tampilan postingan (Susi Artuti Erda Dewi et al., 2023).

### **6. Evaluasi Effectiveness dan Satisfaction Quality in Use Model pada Aplikasi Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru**

Penelitian oleh Fitriisia Y. dan Fadhli M., diterbitkan di *Jurnal Komputer Terapan* pada tahun 2022, mengevaluasi aplikasi Bank Sampah DLHK Pekanbaru dari segi efektivitas dan kepuasan pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aplikasi telah berjalan dengan benar dan tidak ada kesalahan fungsi, serta memenuhi kebutuhan pengguna dengan skor kepuasan antara 80%-100% (Fitriisia & Fadhli, 2022).

### **7. Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Penelitian oleh Suci Arischa, yang diterbitkan di *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau* pada tahun 2019, menganalisis beban kerja di bidang pengelolaan sampah DLHK Pekanbaru. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah sumber daya manusia dan armada pengangkut sampah masih



belum mencukupi untuk menangani volume sampah yang tinggi di Pekanbaru, sehingga menyebabkan masalah dalam pengelolaan sampah (Suci Arischa, 2019).

## **8. Analisis Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Sukawinatan dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang**

Penelitian oleh Deselta A. dan Nugroho A., diterbitkan di Jurnal Discretie pada tahun 2021, mengevaluasi peran DLHK Palembang dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan. Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif dan menemukan bahwa masih banyak masalah dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan, yang memerlukan pembaruan dan pedoman dari peraturan perundang-undangan (Deselta & Nugroho, 2021).

## **9. Implementasi SCRUM Model dalam Pengembangan Aplikasi Pelaporan Sampah sebagai Wujud Smart Cleaning**

Penelitian oleh Hutrianto H. dan Putra A., yang diterbitkan di JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) pada tahun 2020, mengembangkan aplikasi pelaporan sampah menggunakan model SCRUM. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat melaporkan kondisi kebersihan kepada DLHK Kota Palembang. Aplikasi ini memiliki antarmuka mobile dan web, yang mempermudah proses pelaporan dan tindakan oleh dinas terkait (Hutrianto & Putra, 2020).

## **10. Program CSR PT Astra Internasional dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Gerakan Semangat Kurangi Plastik**

Penelitian oleh Qonaah S., Giantika G., dan Bender G. W., yang diterbitkan di Jurnal Public Relations (J-PR) pada tahun 2022, mendeskripsikan program CSR PT Astra Internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui gerakan pengurangan plastik di Kampung Berseri Astra Talagasari, Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dan menemukan bahwa program ini berhasil mengurangi sampah plastik sekitar 10,2 ton per bulan serta meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan ekonomi masyarakat setempat (Qonaah et al., 2022).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, menawarkan beberapa kontribusi baru dalam pemahaman tentang manajemen lingkungan di konteks lokal. Pertama, penelitian ini menyoroti pentingnya implementasi kebijakan dan regulasi yang sesuai dalam memastikan efektivitas pengelolaan sampah. Dengan mendalaminya, peneliti mengungkapkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan tetapi juga pada kemampuan implementasi di lapangan, termasuk dalam hal sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi pelaporan sampah, menjadi terobosan baru dalam mempercepat respons terhadap masalah lingkungan di tingkat lokal. Dengan mengadaptasi model Scrum dalam pengembangan aplikasi

tersebut, studi ini menegaskan bahwa pendekatan inovatif dapat meningkatkan efisiensi dan partisipasi publik dalam mengelola sampah. Implementasi aplikasi ini tidak hanya mempermudah pelaporan dan pengelolaan sampah tetapi juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Palembang dapat terus memperbaiki strategi dan praktik dalam pengelolaan sampah, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi penduduk kota. Dengan memfokuskan pada kebijakan, implementasi teknologi, dan partisipasi publik, penelitian ini tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman global tentang manajemen lingkungan perkotaan.

### **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Palembang” adalah untuk mencapai beberapa hal yang penting. Pertama, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam peran yang dimainkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dalam mengelola sampah. Kedua, penelitian ini akan mendeskripsikan faktor-faktor hambatan yang sering dihadapi oleh dinas tersebut dalam menjalankan fungsi pengelolaan sampah di tengah masyarakat Palembang. Ketiga, tujuan lainnya adalah untuk memahami upaya konkret yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dalam mengatasi tantangan dalam pengelolaan sampah, termasuk implementasi kebijakan, teknologi, dan program partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi pengelolaan sampah di Palembang, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di masa depan.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dasar-dasar pemikiran dan langkah-langkah yang diambil dalam mengungkapkan kebenaran tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memahami fenomena yang kompleks dan beragam terkait dengan manajemen sampah di kota tersebut (Murdiyanto, 2020).

Pertama-tama, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono (2012), yang mendasarkan analisisnya pada filsafat post-positivisme. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks alamiah dari objek penelitiannya, yaitu peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam konteks pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, menggabungkan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, menekankan pada pemahaman makna dari setiap informasi yang terkumpul daripada generalisasi statistik (L.J Moleong, 2022).



Kedua, dalam operasionalisasi konsep, penelitian ini mengacu pada teori peran yang dikemukakan oleh Arimbi & Santosa (2003). Konsep peran dipahami sebagai suatu kebijakan, strategi, alat komunikasi, dan alat penyelesaian sengketa dalam konteks manajemen sampah di Palembang. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi dimensi-dimensi peran yang dimainkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam upaya mereka (Rijali, 2019).

Ketiga, sumber data dan informan dalam penelitian ini menjadi aspek krusial. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan pengangkut sampah, serta tokoh masyarakat dan organisasi terkait. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan terkait dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Penggunaan metode purposive sampling dan snowball sampling dalam pemilihan informan memastikan relevansi dan representativitas data yang diperoleh (Hasibuan et al., 2022).

Keempat, instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, didukung dengan alat bantu seperti pedoman wawancara, perekam audio, dan dokumentasi visual. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi partisipatif untuk memahami secara langsung dinamika lapangan, wawancara semi-struktural untuk mendalami pandangan dan pengalaman informan, serta studi dokumentasi untuk memperoleh data historis dan kebijakan terkait (Sari sasi gendro, 2022).

Terakhir, teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan proses reduksi data, penyajian data dalam format naratif, dan penarikan kesimpulan yang memadai berdasarkan temuan dari semua data yang terkumpul. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang kompleksitas manajemen sampah di konteks lokal, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung perbaikan kebijakan dan praktik terkait di masa depan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di kota Palembang dalam menanggulangi pengelolaan sampah**

Pertama-tama, peran DLHK sebagai kebijakan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. DLHK bertugas merumuskan kebijakan dan regulasi seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini mencakup seluruh siklus pengelolaan sampah dari pemilahan hingga pembuangan akhir, yang diawasi dan diterapkan secara konsisten untuk mencapai tujuan kebersihan lingkungan.

Kedua, peran DLHK sebagai strategi meliputi upaya strategis dalam merancang kebijakan pengelolaan sampah yang holistik. Ini mencakup analisis kondisi, identifikasi tantangan, serta

merumuskan tujuan jangka panjang dan prioritas untuk pengurangan sampah, pemilahan, daur ulang, dan pengelolaan limbah berbahaya. Kolaborasi dengan pihak terkait seperti industri daur ulang dan komunitas lokal menjadi bagian integral dari strategi ini untuk mendukung keberlanjutan program-program pengelolaan sampah.

Ketiga, peran DLHK sebagai alat komunikasi menjadi penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Melalui kampanye sosialisasi, edukasi publik, dan program-program pendidikan, DLHK berkomunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Komunikasi ini juga terjalin dengan pihak eksternal seperti pengangkut sampah dan tokoh masyarakat untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan.

Keempat, peran DLHK sebagai alat penyelesaian sengketa menonjol ketika terjadi konflik terkait pengelolaan sampah. DLHK berperan sebagai mediator atau fasilitator untuk memediasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa dan meminimalkan potensi ketegangan antara stakeholder yang terlibat.

Kelima, dalam konteks implementasi teori peran ini, hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait menguatkan bukti akan keberhasilan dan tantangan yang dihadapi DLHK. Dari petugas TPA hingga tokoh masyarakat, kerjasama aktif dan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik semakin meningkat. Ini juga mencerminkan upaya DLHK dalam mengintegrasikan berbagai strategi untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sampah di kota Palembang.

Secara keseluruhan, DLHK tidak hanya bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pengelolaan sampah, tetapi juga berperan sebagai strategi, alat komunikasi, dan alat penyelesaian sengketa yang penting. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, DLHK terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam upaya bersama menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

### **3.2 Faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di kota Palembang**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, suatu tantangan besar dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kota. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, serta menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi.

#### **Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Sampah**

DLHK memiliki beberapa faktor pendukung yang krusial untuk menjalankan tugas pengelolaan sampah dengan efektif:



1. **Strategi yang Efisien:** DLHK telah menyusun strategi yang efisien dalam pengumpulan, pemisahan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan sampah. Rencana ini mendukung upaya mereka untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.
2. **Pengawasan dan Evaluasi Berkala:** Pengawasan dan evaluasi yang rutin terhadap proses pengelolaan sampah memastikan keberhasilan implementasi. DLHK melakukan pemantauan teratur terhadap aktivitas pengelolaan sampah untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah.
3. **Kebijakan Pemerintah yang Mendukung:** Dukungan dari kebijakan pemerintah yang jelas dan konsisten menjadi landasan yang penting bagi DLHK. Regulasi yang mengatur pemilahan sampah, pengurangan sampah, daur ulang, dan teknologi ramah lingkungan memberikan arah yang diperlukan.
4. **Kerjasama dengan Pihak Terkait:** Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti bank sampah dan komunitas perlindungan lingkungan, memperluas sumber daya dan mendukung infrastruktur pengelolaan sampah di Palembang. Ini juga mempercepat kemajuan dalam pengelolaan sampah.
5. **Peran Masyarakat dan Komunitas Lokal:** Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta partisipasi dalam program pemilahan sampah, memberikan kontribusi penting dalam mengurangi beban sampah di kota. Komunitas lokal juga mendukung inisiatif daur ulang dan pengolahan sampah.

#### **Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Sampah**

Meskipun memiliki faktor pendukung yang kuat, DLHK juga menghadapi sejumlah faktor penghambat yang perlu diatasi:

1. **Kurangnya Sumber Daya:** Anggaran terbatas, kekurangan personel terlatih, dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi hambatan utama bagi DLHK dalam memperbaiki infrastruktur dan melaksanakan program pengelolaan sampah secara optimal.
2. **Kesadaran dan Keterlibatan yang Rendah:** Kurangnya kesadaran dan keterlibatan dari staf internal dapat menghambat efektivitas implementasi praktik pengelolaan sampah yang baik. Tanpa komitmen yang kuat, program pemilahan dan pengurangan sampah sulit untuk dilaksanakan dengan baik.
3. **Kurangnya Koordinasi Internal:** Kurangnya koordinasi antar unit di dalam DLHK bisa mengakibatkan tumpang tindih tugas dan keputusan yang tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini menghambat efisiensi operasional dalam pengelolaan sampah.
4. **Kurangnya Dukungan Kebijakan:** Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten atau kurang mendukung juga menjadi kendala dalam implementasi pengelolaan sampah yang efektif. Regulasi yang tidak jelas dapat menghambat kemajuan dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

5. **Keterbatasan Infrastruktur:** Infrastruktur yang terbatas, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) dan fasilitas pengolahan sampah, menjadi penghambat signifikan dalam upaya DLHK untuk mengelola sampah secara efektif dan ramah lingkungan.

### **3.3 Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang telah mengimplementasikan berbagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah di kota ini. Sebagai garda terdepan, DLHK secara aktif mengembangkan strategi untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama mereka adalah pada upaya langsung dan tidak langsung.

Secara langsung, DLHK melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pelatihan dan penyuluhan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam pemilahan, pengurangan, dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi dalam praktik daur ulang dan penggunaan kompos sebagai pupuk organik, yang menjadi bagian integral dari upaya ini. Selain itu, DLHK juga mengembangkan program daur ulang yang efektif dengan menggandeng pihak swasta dan lembaga daur ulang untuk memastikan adanya fasilitas dan proses yang tepat dalam mengolah sampah menjadi bahan baku bernilai.

Di samping upaya langsung, DLHK juga menerapkan strategi tidak langsung melalui pengembangan peraturan dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Mereka telah menetapkan regulasi ketat tentang pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Untuk mendorong kepatuhan, DLHK memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang menerapkan praktik pengelolaan sampah yang baik. Pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten juga dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif.

Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait juga menjadi salah satu strategi DLHK dalam mengelola sampah secara holistik. Mereka menjalin kemitraan dengan perangkat daerah lain, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk saling berbagi informasi, sumber daya, dan pengalaman dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jaringan dukungan, tetapi juga menggalang partisipasi aktif dari komunitas lokal, sekolah, dan lembaga pendidikan untuk mendukung program-program pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh DLHK.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Diskusi mengenai temuan utama dalam penelitian ini menyoroti pentingnya faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang. Temuan menunjukkan bahwa faktor internal seperti strategi efisien, pengawasan berkala, dan komitmen tim dapat memperkuat upaya pengelolaan sampah. Dukungan dari kebijakan



pemerintah yang konsisten dan kolaborasi dengan pihak terkait juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas DLHK dalam mengelola sampah.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran dan keterlibatan dari staf internal, serta koordinasi yang belum optimal di dalam dinas tersebut. Kurangnya dukungan kebijakan yang konsisten dan infrastruktur yang terbatas juga menjadi tantangan yang signifikan dalam implementasi praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Diskusi ini menunjukkan bahwa meskipun ada pencapaian dalam pengelolaan sampah di Palembang, terdapat ruang untuk perbaikan yang dapat diambil dari temuan tersebut. Upaya untuk mengatasi hambatan ini akan mendukung visi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi penduduk kota.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik**

Diskusi mengenai temuan menarik dalam penelitian ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang dalam mengelola sampah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat dukungan kuat dari faktor internal seperti strategi efisien dan komitmen tim, hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi internal masih menjadi kendala serius. Selain itu, pentingnya dukungan eksternal seperti kebijakan pemerintah yang konsisten dan kolaborasi dengan pihak terkait juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Temuan ini memberikan gambaran bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien, diperlukan integrasi yang lebih baik antara semua pihak terkait dan peningkatan dalam penggunaan sumber daya yang ada. Langkah-langkah ini akan membantu DLHK Palembang dalam mengatasi tantangan yang kompleks dan mencapai tujuan untuk lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.

## **IV. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian, beberapa kesimpulan dapat ditarik yang menjadi refleksi atas tantangan dan peluang dalam pembentukan BUMKam di daerah pedalaman. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia terlatih menjadi salah satu hambatan utama, di mana rendahnya kemampuan manajerial dan keterampilan bisnis menghambat pengelolaan BUMKam secara efektif. Kedua, tingkat regulasi yang tidak memadai, khususnya terkait regulasi BUMKam, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pembentukan dan operasional BUMKam. Ketiga, ketidakstabilan politik atau konflik sosial menjadi faktor yang mengganggu aktivitas ekonomi, menurunkan minat masyarakat dan pengusaha lokal untuk terlibat dalam BUMKam.

Selain itu, kurangnya akses dan infrastruktur menjadi hambatan lainnya, di mana infrastruktur yang tidak memadai menghambat operasional dan distribusi produk BUMKam. Terakhir, kurangnya

kesadaran dan minat kewirausahaan di masyarakat juga menjadi kendala, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan budaya kewirausahaan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia melalui program pelatihan keterampilan manajerial dan bisnis secara berkelanjutan. Kedua, dibutuhkan pengembangan regulasi khusus tentang BUMKam serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mendukung BUMKam. Ketiga, pentingnya meningkatkan keamanan dan stabilitas lingkungan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi aktivitas ekonomi, serta memperbaiki infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan telekomunikasi di daerah pedalaman.

Selain itu, perlu dilakukan upaya meningkatkan kesadaran dan minat kewirausahaan melalui kampanye edukasi, program penghargaan, serta pendidikan dan pengembangan jiwa kewirausahaan sejak dini. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pembentukan dan operasional BUMKam di daerah pedalaman dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi lokal.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan penelitian ini meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, penggunaan metode dokumentasi dan wawancara sebagai teknik utama pengumpulan data dapat membatasi kedalaman analisis terhadap dinamika operasional DLHK Kota Palembang. Meskipun telah dilakukan secara teliti, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan tidak semua variabel atau faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah dapat diteliti secara mendalam. Selain itu, ketergantungan pada data sekunder seperti dokumen resmi dan laporan tahunan DLHK dapat membatasi akses terhadap informasi yang lebih terperinci atau aktual. Selanjutnya, keterbatasan dalam sampel wawancara yang mungkin tidak mencakup semua stakeholder yang relevan dalam pengelolaan sampah juga dapat mempengaruhi representasi keseluruhan hasil. Meskipun demikian, upaya telah dilakukan untuk memitigasi keterbatasan ini dengan memilih responden yang beragam dari berbagai latar belakang dan posisi di DLHK. Meskipun demikian, temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami tantangan dan potensi dalam pengelolaan sampah di konteks lokal Palembang, Sumatera Selatan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Untuk mengarahkan penelitian di masa depan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, penelitian dapat diperluas dengan memasukkan studi komparatif antara DLHK Palembang dengan dinas lingkungan hidup di kota-kota lain di Indonesia atau bahkan di tingkat internasional untuk membandingkan praktik terbaik dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi implementasi teknologi hijau dan inovasi dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Pengembangan model atau kerangka kerja yang lebih holistik untuk evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan pengelolaan sampah juga merupakan arah yang menarik untuk dieksplorasi. Terakhir, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat



lokal, industri, dan akademisi dalam proses penelitian dan pengambilan keputusan akan membantu memastikan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah di masa mendatang.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Deselta, A., & Nugroho, A. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Sukawinatan dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. *Jurnal Discretie*, 2(1). <https://doi.org/10.20961/jd.v2i1.52854>
- Fitrisia, Y., & Fadhli, M. (2022). Evaluasi Effectiveness dan Satisfaction Quality in Use Model pada Aplikasi Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. *Jurnal Komputer Terapan*, 8(1). <https://doi.org/10.35143/jkt.v8i1.5244>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Hutrianto, H., & Putra, A. (2020). IMPLEMENTASI SCRUM MODEL DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI pelAPORAN SAMPAH SEBAGAI WUJUD SMART CLEANING. *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 5(1). <https://doi.org/10.29100/jipi.v5i1.1552>
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Ninef, R. Y., Harton, S., & Rochim, A. I. (2023). PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3(1). <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1841>
- Qonaah, S. qonaah, Giantika, G. G., & Bender, G. W. (2022). Program CSR PT Astra Internasional Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Gerakan Semangat Kurangi Plastik. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 3(1). <https://doi.org/10.31294/jpr.v3i1.1084>
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rusadi, S., & Setiawan, W. (2022). Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(1). [https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(1\).6446](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(1).6446)

- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Sihombing, J., Wirantari, I. D. A. P., & Supriyanti, N. W. (2023). Evaluasi Kinerja Aplikasi SiDarling dalam Pengelolaan Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Provinsi Bali. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3). <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.69>
- Suci Arischa. (2019). Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 6(Edisi 1 Januari-Juni 2019).
- Susi Artuti Erda Dewi, Rosmala, & Debby Kurniadi. (2023). Efektivitas Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Komunikasi Publik Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. *JURNAL SOSIO-KOMUNIKA*, 2(1). <https://doi.org/10.57036/jsk.v2i1.49>
- Sutinah Andaryani, Dwikurniawati, I. U., & Rusdi, R. (2023). Pelaksanaan Pengolahan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1). [https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).12551](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).12551)

